

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Diana Napitupulu, 2024, *Legalisasi Dokumen Publik Berdasarkan Konvensi Apostille*, UKI Press, Jakarta.
- E.S. Wiradipradja, 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung.
- Eddy Purwanto, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Fakhry Amin, Et. Al., 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Hague Conference on Private International Law, 2023, *Apostille Handbook: Practical Handbook on the Operation of the Apostille Convention*, Hague Conference on Private International Law (HCCH), The Hague.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Zablud, 2006, *The Operation of the Apostille Convention, Now and Into the Future*, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries, Melbourne.

Rusdin Tahir, Et. Al., 2024, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Syofyan Ahmad, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta.

B. PERATURAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN NASIONAL INDONESIA

Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan *Apostille*

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

C. JURNAL

Ahmad Haris Junaidi, 2018, “Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam Akses Konvensi *Apostille*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 2.

Abdi Rabidin, Galang Asmara, dan Minollah, 2022, “Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam Pembangunan Desa”, *Journal Education and Development*, Vol. 10 No. 1.

Agus Riyanto, 2023, “Kebenaran Materiil Dokumen *Apostille*”, *Jurnal Petita*, Vol. 5 No. 1.

Alunaza Hardi, Suci Cantika, dan Annisa Umniyah, 2025, “Pengaruh Globalisasi terhadap Peningkatan Interdependensi Negara Berkembang di Asia Tenggara pada Negara Tiongkok”, *Jurnal Politica*, Vol. 16 No. 1.

Ara Annisa Almi, 2022, “Mencandra Akses *Apostille* Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2 No. 2.

Budiman, Et. Al., 2025, “Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd. dengan PT Srijati Gandasari terhadap Konvensi *Apostille*”, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2.

Edmon Makarim, 2015, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 4.

- Edward James Sinaga, 2019, “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services for Legal Certainty)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 1.
- Erriyanti Samuhedah dan Edmon Makarim, 2024, “Kerancuan Pelaksanaan Konvensi *Apostille* di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik di Indonesia”, *Indonesian Notary*, Vol. 5 No. 4.
- Hasanova Nazrin, 2023, “The Electronic *Apostille* in Worldwide Circulation of Public Documents”, *Journal International Law Private*, Vol. 9 No. 1.
- Kusnu Goesniadhie, 2004, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 27.
- M. Rizal Nurhidayatullah, 2023, “Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi *Apostille*”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 1.
- Maria Farida Indrati, 2007, “Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Melly Aida, Et. Al., 2023, “Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi *Apostille* dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 12 No. 1.
- Najma Fauziya dan Elan Jaelani, 2024, “Efektivitas dan Hambatan yang Timbul dari Penegakan Konvensi *Apostille* di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 2.
- Nodira Allaberganova, 2025, “The Legalization of Foreign Public Documents: Historical Development and Contemporary Challenges”, *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, Vol. 7 No. 8.
- Pebrika Aurelia dan Lies Ariany, 2025, “Analisis Kekuatan Hukum terhadap Keberlakuan Konvensi *Apostille* dalam Pembuktian Dokumen Asing di Indonesia”, *Jurnal Lex Positivis*, Vol. 3 No. 1.
- Rahma Zahrani, 2024, “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Konvensi *Apostille* di Indonesia Sebagai Negara yang Mengaksesi”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 5.

- Raysisca Elvide, Yuhelson, dan Yuherman, 2023, “Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat *Apostille* sebagai Legalisasi Publik Terkait dengan Akta Notaris sebagai Dokumen dalam Ranah Privat”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 9.
- Rifa Fajriani dan Elan Jaelani, 2023, “Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention *Apostille* dan Dampaknya terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia”, *Jurnal Public Sphere*, Vol. 2 No. 3.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, “Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Suhartono, 2011, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wicipto Setiadi, 2007, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Willy Pradana, 2024, “Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui *Apostille* Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Zulfa Joko Basuki, 2013, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents”, *Makalah*, disampaikan dalam Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta.

D. WEBSITE

- Astuti, “Mengenal Sertifikat *Apostille*, Legalisasi Dokumen Publik Lintas Negara”, <https://lexmundus.com/articles/mengenal-sertifikat-Apostille-legalisasi-dokumen-publik-lintas-negara/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2025
- Hague Conference on Private International Law (HCCH). “*Apostille* Convention (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) – Status table.”

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41>,

Diakses pada 3 januari 2026.

Hague Conference on Private International Law, “*14th International Forum on the electronic Apostille Pilot Programme (e-APP)*,”

<https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/specialised-sections/Apostille/> diakses tanggal 20 januari 2026.

Hague Conference on Private International Law (HCCH), “*Apostille Section*,”

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/Apostille> diakses pada 22 Maret 2026.

Kementerian Hukum Republik Indonesia, Aplikasi Legalisasi Apostille,

<https://Apostille.ahu.go.id/>, di akses pada 20 Oktober 2025.

Priskila P. Penasthika, “*Aksesi Indonesia Terhadap the HCCH 1961 Apostille Convention*,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19 Oktober 2021,

<https://law.ui.ac.id/aksesi-indonesia-terhadap-the-hcch-1961-Apostille-convention-oleh-priskila-p-penasthika/> diakses pada 22 Maret 2026.

SIP Law Firm. “*Pentingnya Sertifikat Apostille dalam Mempercepat Legalisasi Dokumen*,” <https://siplawfirm.id/sertifikat-Apostille/?lang=id>. Diakses

pada 21 Oktober 2025

